# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini, membahas mengenai alasan-alasan yang menjadi latar belakang masalah mengenai hal-hal yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Latar belakang tersebut menjadi landasan rumusan penelitian yang menjadi fokus utama peneliti. Selanjutnya, juga akan dibahas mengenai tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan.

Dalam bab ini juga memuat kesenjangan (*gap*) riset dan fenomena yang terjadi. Fenomena tersebut disampaikan secara langsung melalui penyajian data yang terkait dengan topik peneliti.

# **Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas mencapai 1.905 juta km² dengan demikian dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi, yang mana daerah provinsi tersebut terdiri atas kabupaten dan kota, sehingga tidak memungkinkan bagi pemerintah pusat untuk bekerja sendiri dalam mengendalikan seluruh kegiatan pemerintahan dari ibukota negara. Oleh karena itu pemerintah daerah diberikan suatu kewenangan yang disebut dengan otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian prinsip dasar otonomi daerah adalah mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan desentralisasi dengan adanya kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Tujuan otonomi daerah dengan berasaskan desentralisasi adalah agar pemerintah daerah memiliki wewenang untuk merencanakan dan melakukan pembangunan di daerahnya sesuai dengan kehendak mereka. Salah satu tujuan dari desentralisasi adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting karena sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan yang menjadi unsur rumah tangganya.

Dalam konteks fungsi pajak sebagai *budgeter*, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah termasuk pembiayaan bagi pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahan, ini dikarenakan pajak merupakan salah satu unsur terselenggaranya fungsi pemerintahan. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijadikan tolok ukur dalam mengetahui derajat kemandirian suatu pemerintah daerah. Sehingga keadaan seperti ini menuntut pemerintah daerah untuk melakukan suatu upaya untuk meningkatkan potensi-potensi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sumber PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD. Dari empat sumber PAD diatas, salah satu sumber yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap penerimaan PAD adalah berasal dari Pajak Daerah. Pada tahun 2017 Pajak Daerah memberikan kotribusi terbesar dalam APBD DKI Jakarta yaitu sebesar 57,01% (apbd.jakarta.go.id). Terdapat enam Pajak Daerah yang memberikan kontribusi terbesar diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak daerah sangat penting agar dapat meningkatkan PAD, maka dari itu pemerintah harus dapat memaksimalkan pajak daerah secara baik agar sumber pendapatan daerahnya meningkat.

Menyikapi pencapaian target Pajak Daerah, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengemukakan beberapa alasan yang menyebabkan rendahnya pendapatan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Berbagai masalah turut mempengaruhi yang membuat pendapatan daerah DKI Jakarta hanya 67,38 persen saja yang tercapai. PAD Pemprov DKI Jakarta tahun 2014 naik dari tahun sebelumnya. PAD tahun lalu menurut Ahok sebesar Rp 31,29 triliun. "Naik Rp 4,42 triliun atau 16,64 persen dari realisasi tahun 2013," kata Ahok. Meskipun naik, PAD DKI Jakarta ini masih belum mencapai target sebesar Rp 39,75 triliun. PAD didapat Pemprov DKI Jakarta dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah. Rendahnya PAD ini menurut Ahok karena pajak daerah yang juga rendah. Penyebabnya ada beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak, menurunnya daya beli masyarakat dan program pemerintah Jakarta yang masih belum berjalan maksimal (cnnindonesia.com).

DKI Jakarta merupakan pusat pemerintah Republik Indonesia sehingga menjadikan kota Jakarta sebagai indikator pertumbuhan perekonomian utama Indonesia. Ada banyak macam objek bisnis formal yang bermunculan di Jakarta dan setiap pemekaran yang dilakukan untuk objek seperti hotel, restoran, hiburan dan objek lainnya. Semua sektor akan membutuhkan reklame karena ada perusahaan dan pebisnis yang menggunakan reklame sebagai iklan untuk menginformasi dan mempromosikan perusahaan ataupun produknya. Setiap tahun jumlah kendaraan bermotor meningkat, sehingga membuat jasa parkir semakin dibutuhkan. Peningkatan jumlah kendaraan ini menyebabkan naiknya pendapatan parkir yang akan mempengaruhi naiknya Pajak Parkir.

Jumlah hotel yang semakin berkembang diperkirakan akan mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel berdasarkan hasil penelitian Alfiandi et al. (2017), menemukan bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nikmah (2017) yang menemukan bahwa Pajak Hotel tidak memiliki pengaruh terhadap PAD.

Jumlah restoran semakin berkembang didukung juga dengan berbagai macam *trend* restoran. Zaman sekarang terdapat berbagai macam tempat makan seperti kafe, rumah makan, dan bar. Tentu saja hal tersebut mempengaruhi penerimaan Pajak Restoran. Berdasarkan hasil penelitian Wahyuni dan Utara (2018) menemukan bahwa Pajak Restoran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD sedangkan menurut Wibowo (2015) Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap PAD.

DKI Jakarta merupakan pusat bisnis dimana orang-orang bekerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, untuk menghilangkan penat dari hiruk pikuk dunia kerja dibutuhkanlah hiburan. Hiburan yang dapat dinikmati seperti taman hiburan, *live music*/musik hidup, diskotik, bioskop, dan tempat karaoke. Dengan banyaknya jumlah tempat hiburan akan mendorong penerimaan Pajak Hiburan. Berdasarkan hasil penelitian Fikri dan Mardani (2017) menemukan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, namun pernyataan ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Anggraini (2017) yang menemukan bahwa Pajak Hiburan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.

Dalam bisnis konvensional maupun *online* dibutuhkan media untuk melakukan promosi agar para konsumen dapat mengetahui produk yang dijual. Reklame merupakan salah satu cara yang dapat digunakan, dengan menggunakan papan *billboard* ataupun *videotron* yang pada umumnya relatif besar dan ditempatkan di keramain kota otomatis akan memancing perhatian masyarakat sehingga mendorong terjadinya pembelian. Hal tersebut dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Reklame. Menurut penelitian Vina et al. (2013) menyatakan bahwa Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD sedangkan menurut Zulhalidi (2015) Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap PAD.

Mobilitas terjadi setiap hari di kota Jakarta seperti bekerja, sekolah, atau aktivitas lainnya. Menurut Kompas.com pada tahun 2014 diperkirakan 62% penduduk Jakarta bergantung pada kendaraan pribadi. Mobilitas menyebabkan peningkatan pemakaian kendaraan bermotor sehingga dibutuhkanlah lahan parkir. Pemerintah daerah dan pebisnis melihat peluang untuk meningkatkan tarif parkir. Tarif parkir yang cenderung naik setiap tahunnya akan mempengaruhi penerimaan Pajak Parkir. Menurut penelitian Pujihastuti & Tahwin (2016) Pajak Parkir berpengaruh positif signifikan terhadap PAD sedangkan hasil penelitian Serly Arisandi (2015) menyatakan bahwa Pajak Parkir tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Periode 2008-2017”.**

# **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan sebagai:

1. Apakah penerimaan Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta?
2. Apakah penerimaan Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta?
3. Apakah penerimaan Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta?
4. Apakah penerimaan Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta?
5. Apakah penerimaan Pajak Parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta?

# **Batasan Penelitian**

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini terlalu luas jika diteliti secara menyuluruh. Karena keterbatasan penulis dala mengumpulkan data, maka penelitian ini hanya dibatasi pada:

1. Wilayah DKI Jakarta.
2. Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir periode 2008-2017.
3. Data yang tersedia di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

# **Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah penerimaan dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta periode 2008-2017”.

# **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini, yaitu

1. Mengetahui apakah penerimaan Pajak Hotel mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.
2. Mengetahui apakah penerimaan Pajak Restoran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.
3. Mengetahui apakah penerimaan Pajak Hiburan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.
4. Mengetahui apakah penerimaan Pajak Reklame mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.
5. Mengetahui apakah penerimaan Pajak Parkir mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.

# **Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait antara lain:

1. Bagi peneliti

Sebagai pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan, menambah pengetahuan baik secara teori maupun praktik serta memperoleh data bahan penulisan skripsi. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memperluas dalam menganalisis suatu permasalahan.

1. Bagi akademisi

Dapat dijadikan pedoman sebagai bahan kajian perkuliahan tentang pengaruh penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi yang telah diberikan serta dapat menerapkan ilmunya sebagai bahan evaluasi terhadap materi yang telah diberikan.

1. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain baik mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Giesendiri maupun mahasiswa dari kampus lainnya yang ingin mengulas masalah pajak daerah dengan obyek penelian yang sama.

1. Bagi para pembaca

Memberi pengetahuan kepada pembaca mengenai pengaruh penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.

1. Bagi pemerintah DKI Jakarta

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah DKI Jakarta dalam evaluasi untuk mengembangkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir.